

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Strategi

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani "*strategos*", merujuk pada peran seorang komandan militer pada masa demokrasi Athena. Secara konseptual, strategi awalnya berkaitan dengan upaya mengatur dan mengarahkan kekuatan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif. Strategi merupakan rencana berskala besar yang berorientasi jangka panjang dan dirancang untuk memungkinkan organisasi berinteraksi secara optimal dengan lingkungannya. Strategi tersebut disusun untuk menghadapi persaingan dan diarahkan pada pencapaian tujuan serta sasaran organisasi secara maksimal (Musa & Ichwan, 2023).

Strategi adalah rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan utama organisasi (Riswanto *et al.*, 2024). Strategi melibatkan pengambilan keputusan pada tingkat manajerial yang berkaitan dengan arah dan sasaran organisasi secara keseluruhan, termasuk dalam menghadapi persaingan, pengelolaan sumber daya, dan pemanfaatan peluang pasar. Menurut, Michael Porter *dalam* Riswanto *et al.* (2024), strategi berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berbeda dari pesaing guna menciptakan posisi yang unik dalam industri. Posisi tersebut dibangun melalui kombinasi aktivitas yang terintegrasi sehingga mampu menghasilkan keunggulan kompetitif.

Menurut Iskandarwasid dan Sunendar *dalam* Kamaruddin *et al.* (2022), strategi adalah rencana yang dirancang dengan cermat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Secara umum, strategi dapat didefinisikan sebagai arah tindakan luas yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pembelajaran, strategi didefinisikan sebagai pola interaksi antara guru dan siswa dalam proses belajar-mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Webster New World Dictionary dalam Musa & Ichwan (2023) menjelaskan bahwa strategi merupakan suatu keilmuan yang berkaitan dengan perencanaan serta pengoordinasian berbagai aktivitas secara terpadu, termasuk upaya menempatkan kekuatan pada posisi yang paling menguntungkan sebelum berhadapan dengan pihak lain. Selain itu, strategi juga dimaknai sebagai kemampuan dalam

merumuskan langkah-langkah atau pendekatan yang tepat dan terarah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penerapannya, strategi perlu dipahami melalui tiga dimensi utama, yaitu *process*, *content*, dan *context*.

1. *Strategy Process*

Strategy process merujuk pada mekanisme atau tahapan yang menggambarkan bagaimana suatu strategi muncul, dirancang, dan dikembangkan dalam organisasi. Proses ini mencakup pembahasan mengenai cara penyusunan strategi, pihak-pihak yang terlibat, serta waktu pelaksanaan strategi tersebut. Di dalamnya termasuk kegiatan analisis, perumusan, pembentukan, penerapan, evaluasi, penyesuaian, hingga pengendalian strategi. Selain itu, *strategy process* juga menekankan peran aktor yang berpartisipasi dalam penyusunan strategi serta pengaturan waktu berbagai aktivitas yang diperlukan guna mencapai tujuan organisasi.

2. *Strategy Content*

Strategy content merujuk pada keluaran atau hasil yang dihasilkan dari rangkaian proses strategi (*strategy process*). Jika dipandang dari sudut pertanyaan, *strategy content* berkaitan dengan dimensi “apa” dalam strategi, yaitu mengenai pengertian strategi serta isi atau substansi strategi yang perlu dimiliki oleh suatu organisasi. Konsep ini menjelaskan arah dan alternatif pilihan strategi yang ditetapkan, baik pada tingkat organisasi secara menyeluruh maupun pada masing-masing unit atau bagian yang ada di dalam organisasi.

3. *Strategy Context*

Strategy context merujuk pada berbagai kondisi atau situasi yang memengaruhi serta menentukan bagaimana proses strategi (*strategy process*) berlangsung dan bagaimana isi strategi (*strategy content*) dirumuskan. Apabila dikaji dalam bentuk pertanyaan, *strategy context* berkaitan dengan dimensi “dimana” strategi tersebut diterapkan, yaitu mencakup jenis organisasi atau perusahaan tempat strategi dijalankan, serta lingkungan internal dan eksternal yang membentuk, memengaruhi, dan menjadi tempat diterapkannya proses strategi dan substansi strategi tersebut (Musa & Ichwan, 2023).

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan kemampuan dalam menyusun perencanaan berskala besar yang bersifat

jangka panjang melalui pemanfaatan dan pengintegrasian berbagai kekuatan organisasi ke dalam posisi yang paling menguntungkan. Strategi dirumuskan agar organisasi mampu menjalin interaksi yang efektif dengan lingkungannya di tengah kondisi persaingan, serta diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara optimal.

2.1.2. Agribisnis

Agribisnis merupakan suatu konsep yang menjelaskan keterpaduan berbagai aktivitas ekonomi dalam sistem pertanian modern. Istilah agribisnis berasal dari kata *agribusiness*, yang merupakan gabungan dari *agriculture* (pertanian) dan *business* (bisnis). Secara terminologis, agribisnis dimaknai sebagai seluruh aktivitas usaha yang berkaitan dengan sektor perkebunan, baik pada tahap produksi maupun distribusi dan pemasaran (Hidayat *et al.*, 2024). Istilah agribisnis menggambarkan sistem ekonomi yang meliputi seluruh rantai nilai pangan dan produk perkebunan, mulai dari penyediaan input (pasokan produk), proses produksi di tingkat usahatani (*on farm*), pengolahan dan pemasaran produk (*off farm*) hingga layanan pendukung seperti lembaga keuangan, penyuluhan, penelitian dan kebijakan (Denashurya *et al.*, 2025).

Konsep agribisnis tidak terbatas pada kegiatan produksi atau budidaya perkebunan semata, melainkan memiliki cakupan yang lebih komprehensif. Agribisnis mencakup keseluruhan kegiatan ekonomi yang terkait dengan sektor pertanian, mulai dari penyediaan sarana produksi dan infrastruktur, usaha tani dan pengolahan produk (agroindustri), hingga distribusi dan pemasaran produk pertanian kepada konsumen dan pasar. Dengan demikian, agribisnis merepresentasikan keseluruhan rantai nilai (*value chain*) dalam sistem perkebunan, baik dari hulu maupun hilir (Hidayat *et al.*, 2024).

Secara konseptual, manajemen agribisnis merupakan penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan seluruh kegiatan agribisnis, baik pada sektor hulu (*upstream agribusiness*) maupun hilir (*downstream agribusiness*). Tujuannya adalah menghasilkan produk perkebunan yang kompetitif serta memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh pelaku usaha dalam sistem agribisnis. Dalam praktiknya, manajemen agribisnis mencakup fungsi-fungsi manajemen seperti

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, serta optimalisasi penggunaan sumber daya untuk memastikan operasional yang efektif dan efisien.

Sejumlah ahli mengemukakan definisi agribisnis dari berbagai sudut pandang. Menurut E. Paul Roy *dalam* Hidayat *et al.*, (2024), agribisnis terdiri atas tiga komponen utama, yaitu sektor penyediaan sarana produksi perkebunan (*input supply sector*), sektor produksi atau usaha tani (*farm production sector*), serta sektor pemasaran hasil perkebunan (*product marketing sector*). Roy menekankan bahwa keberhasilan sistem agribisnis sangat ditentukan oleh adanya keterpaduan dan koordinasi yang baik antar sektor tersebut untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaannya.

Menurut John H. Davis dan Ray A. Goldberg *dalam* (Musa & Ichwan, 2023), mendefinisikan agribisnis sebagai keseluruhan rangkaian aktivitas yang mencakup produksi dan distribusi sarana perkebunan, kegiatan usaha tani di tingkat lahan, serta proses penyimpanan, pengolahan, dan penyaluran komoditas perkebunan beserta produk turunannya. Mereka memandang agribisnis sebagai sistem yang terintegrasi dan kompleks, karena melibatkan berbagai tingkat kegiatan ekonomi serta interaksi antarberbagai pelaku di dalam sistem yang terintegrasi tersebut.

Dalam konteks Indonesia, Bungaran Saragih *dalam* (Hidayat *et al.*, 2024) memandang agribisnis sebagai suatu sistem, terdapat empat subsistem yang saling terkait: subsistem agribisnis hulu, subsistem usaha tani atau peternakan, subsistem agribisnis hilir, dan subsistem layanan pendukung. Saragih menegaskan bahwa pembangunan agribisnis perlu dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan pada keempat subsistem tersebut agar mampu menghasilkan nilai tambah yang maksimal sekaligus menciptakan manfaat yang berkeadilan bagi para pelaku usaha.

Secara konseptual, cakupan agribisnis dapat diklasifikasikan ke dalam empat subsistem pokok yang saling berhubungan, yaitu:

1. Subsistem Agribisnis Hulu (*Upstream Agribusiness*)

Subsistem agribisnis hulu mencakup berbagai kegiatan industri dan komersial yang menyediakan input untuk produksi tanaman, seperti benih, pupuk, dan pestisida, serta mesin dan peralatan pertanian. Subsistem ini memiliki peran strategis karena menentukan ketersediaan input yang berkualitas tinggi, tersedia tepat waktu, dan terjangkau bagi para petani serta pelaku agribisnis.

2. Subsistem Agribisnis Budidaya (*On-Farm Agribusiness*)
Subsistem agribisnis budidaya atau *on-farm* mencakup produk-produk pertanian seperti tanaman pangan, tanaman sayuran, tanaman herbal, ternak, perikanan, dan hasil hutan. Pada tahap ini, petani atau pelaku usaha agribisnis menggunakan berbagai input produksi dari subsistem agribisnis di atasnya untuk menghasilkan produk tanaman sebagai bahan baku.
3. Subsistem Agribisnis Hilir (*Downstream Agribusiness*)
Subsistem agribisnis hilir mencakup berbagai kegiatan industri dan usaha yang berperan dalam pengolahan, distribusi, dan pemasaran produk perkebunan, baik dalam bentuk segar maupun produk olahan. Subsistem ini meliputi agroindustri pengolahan hasil perkebunan, kegiatan perdagangan, jasa logistik, ritel, hingga layanan penyediaan pangan (*food service*). Peran subsistem hilir sangat penting dalam menciptakan nilai tambah serta memperluas akses pasar bagi produk perkebunan. Agroindustri memiliki peranan strategis dalam meningkatkan nilai tambah produk perkebunan, memperkuat daya saing di pasar, serta mendorong keberlanjutan usaha di sektor perkebunan.
4. Subsistem Jasa Penunjang Agribisnis
Selain ketiga subsistem utama, sistem agribisnis didukung oleh subsistem layanan pendukung, yang mencakup lembaga penelitian dan pengembangan, layanan penyuluhan pertanian, lembaga keuangan, serta kebijakan dan peraturan pemerintah. Subsistem ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, menyediakan akses terhadap informasi dan inovasi teknologi, serta memfasilitasi kolaborasi dan koordinasi di antara para pemangku kepentingan agribisnis (Hidayat *et al.*, 2024).

2.1.3. Kelompok Tani

Kelompok tani merupakan bentuk kelembagaan yang berperan dalam mengoordinasikan serta mengelola aktivitas petani guna meningkatkan produktivitas di sektor perkebunan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016, bahwa kelompok tani dibentuk secara sukarela oleh petani, untuk petani, dan dari petani, didasari oleh kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, serta tujuan yang ingin dicapai bersama. Pada sistem kelembagaan pertanian, kelompok tani memiliki posisi strategis sebagai

sarana pembelajaran, wadah kerja sama, dan unit produksi. Kelompok tani tidak hanya berfungsi sebagai tempat berkumpul bagi para petani, tetapi juga sebagai sarana komunikasi untuk bertukar informasi, melaksanakan kegiatan pelatihan, dan mengembangkan praktik pertanian secara bersama-sama.

Kelompok tani merupakan wadah yang menghimpun petani, peternak, atau pekebun yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi sosial ekonomi, sumber daya, jenis komoditi, serta kedekatan hubungan antar anggota. Pembentukan kelompok tani bertujuan untuk mengembangkan usaha perkebunan secara bersama serta memperkuat posisi tawar petani. Penguatan posisi tawar tersebut terutama dilakukan melalui pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil perkebunan secara kolektif (Maryoto *et al.*, 2025). Penerapan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan kelompok tani mampu tumbuh menjadi kelembagaan yang mandiri, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki kemampuan mengelola usaha perkebunan secara profesional guna mendukung tercapainya pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kelompok yang bertujuan membentuk dan memperkuat kelembagaan petani sehingga mampu meningkatkan kerja sama, baik antar petani maupun antarkelompok tani, guna mendorong efisiensi usaha tani. Peningkatan kapasitas kelompok tani selanjutnya dilakukan melalui kegiatan pendampingan dan pembinaan oleh penyuluh pertanian dengan menerapkan penilaian klasifikasi kapasitas kelompok tani yang disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan kelompok tersebut.

Pembentukan kelompok tani pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha para anggotanya. Kelompok tani merupakan organisasi yang tumbuh dan berfungsi dari, oleh, dan untuk petani yang saling mengenal, memiliki hubungan yang erat, serta dilandasi oleh kepercayaan dan kepentingan bersama di bidang perkebunan. Selain itu, anggota kelompok tani umumnya memiliki kesamaan latar belakang, baik dari sisi tradisi, tempat tinggal, maupun wilayah lahan perkebunan yang dikelola.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016, kelompok tani merupakan kelembagaan petani non formal dengan kriteria sebagai berikut:

1. Ciri-ciri kelompok tani yaitu:
 - a) Saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota.
 - b) Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani.
 - c) Memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi.
 - d) Ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota.
2. Ada beberapa unsur-unsur pengikat kelompok tani yaitu sebagai berikut:
 - a) Adanya kepentingan yang sama di antara anggotanya.
 - b) Adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama di antara para anggotanya.
 - c) Adanya kader tani yang berdedikasi untuk menggerakkan petani dan kepemimpinannya diterima oleh sesama petani lainnya.
 - d) Adanya kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sekurang kurangnya sebagian besar anggotanya.
 - e) Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditentukan.

Menurut Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian *dalam* Kiswanto (2019), menjelaskan bahwa kelas kemampuan kelompok tani ditetapkan berdasarkan nilai yang dicapai oleh masing-masing kelompok untuk lima tolak ukur/jurus kemampuan, yakni dengan kriteria nilai 0 sampai dengan 1000. Berdasarkan nilai tingkat kemampuan tersebut, setiap kelompok tani dikategorikan ke dalam kelas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kelas Pemula, merupakan kelas terbawah dan terendah dengan mempunyai nilai 0 sampai dengan 250.
2. Kelas Lanjut, merupakan kelas yang lebih tinggi dari kelas pemula. Dimana kelompok tani sudah melakukan kegiatan perencanaan meskipun masih terbatas, dengan mempunyai nilai 251 sampai dengan 500.

3. Kelas Madya, merupakan kelas berikutnya setelah kelas lanjut dimana kemampuan kelompok tani lebih tinggi dari kelas lanjut yaitu dengan nilai 501 sampai dengan 750.
4. Kelas Utama, merupakan kelas kemampuan kelompok yang tertinggi, dimana kelompok tani sudah berjalan dengan sendirinya atas dasar prakarsa dan swadaya sendiri, yaitu dengan nilai kemampuan di atas 750.

2.1.4. Fungsi Kelompok Tani

Pembinaan kelompok pertanian diarahkan untuk memberdayakan petani agar mampu bersikap mandiri, memiliki kapasitas dalam menerapkan berbagai inovasi, baik teknis, sosial, maupun ekonomi, memanfaatkan prinsip skala ekonomi, serta mengelola risiko usaha perkebunan. Melalui pembinaan tersebut, petani diharapkan dapat mencapai tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang layak. Dalam perkembangannya, kelompok tani berfungsi sebagai sarana pembelajaran, peningkatan produksi, serta media kerja sama antar anggota. Adapun fungsi kelompok tani sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang kelembagaan kelompok tani adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Kelas Belajar

Kelompok tani berfungsi sebagai tempat untuk mengajar dan belajar bagi anggotanya, dengan tujuan memperluas wawasan, kemampuan, dan sikap, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha perkebunan yang mandiri. Ini dilakukan dengan memanfaatkan dan mengakses sumber informasi serta teknologi, sehingga berpotensi meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kualitas hidup yang lebih baik. Kelompok tani diarahkan agar mempunyai kemampuan:

- a) Mengidentifikasi dan menyusun kebutuhan pembelajaran.
- b) Menyusun rencana dan mempersiapkan kebutuhan pembelajaran.
- c) Membangun kolaborasi dengan sumber informasi yang diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar, baik dari sesama petani, lembaga pemerintahan, dan lainnya.
- d) Menyiapkan suasana lingkungan belajar yang sesuai.
- e) Menjadi aktif dalam proses belajar mengajar.

- f) Menyampaikan dan memahami harapan, pendapat, serta tantangan yang dihadapi oleh anggota kelompok tani.
- g) Menyusun Kerja sama, baik dalam menyelesaikan masalah, maupun kegiatan lainnya.
- h) Menyusun rencana dan melaksanakan pertemuan secara berkala.

2. Sebagai Unit Produksi

Kegiatan usaha perkebunan yang dijalankan oleh masing-masing anggota kelompok tani secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang dapat dikembangkan untuk mencapai efisiensi ekonomi, dengan tetap memperhatikan aspek kuantitas, kualitas, dan keberlanjutan. Dalam perannya sebagai unit produksi, kelompok tani diarahkan untuk memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a) Mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, saprodi, dan sumber daya alam lainnya.
- b) Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan bersama dan rencana kebutuhan kelompok atas dasar pertimbangan efisiensi.
- c) Memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, dan cara) usaha tani para anggotanya sesuai dengan rencana kegiatan kelompok.
- d) Menjalani kerja sama / kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan usaha tani.
- e) Menaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan Bersama dalam organisasi, maupun kesepakatan dengan pihak lain.
- f) Mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan kelompok, sebagai bahan rencana kegiatan yang akan datang.
- g) Meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.
- h) Mengelola administrasi secara baik.

3. Sebagai Wahana Kerja sama

Kelompok tani berperan sebagai wadah untuk memperkuat kerja sama, baik antar petani dalam satu kelompok, antar kelompok tani, maupun dengan berbagai pihak eksternal. Melalui penguatan kerja sama tersebut, usaha perkebunan diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta mampu menghadapi berbagai

ancaman, tantangan, dan kendala, sekaligus meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Dalam fungsinya sebagai wahana kerja sama, kelompok tani diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a) Membangun atmosfer di mana saling mengenal, saling percaya, dan keinginan untuk berkolaborasi hadir secara terus-menerus.
- b) Menciptakan iklim terbuka untuk menyampaikan pendapat guna mencapai target bersama.
- c) Menata dan melaksanakan pembagian tugas di antara anggota sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
- d) Menumbuhkan disiplin dan rasa kewajiban pada diri setiap individu.
- e) Menyusun dan melaksanakan rapat untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.
- f) Mematuhi dan melaksanakan kesepakatan yang telah ditentukan.
- g) Melaksanakan kerja sama atau kemitraan dengan pihak penyedia bahan baku.
- h) Melakukan pengumpulan modal.

2.1.5. Penguatan Kelompok Tani

Lemahnya struktur organisasi yang disertai dengan perencanaan usaha yang belum berjalan optimal menyebabkan berbagai potensi yang dimiliki belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas anggota, memperbaiki tata kelola kelompok, serta memperluas akses terhadap informasi dan pemasaran (Mulyana & ARR, 2025).

Penguatan kelembagaan menurut Bahua (2015) *dalam* Holle (2022) bertujuan agar petani tidak berada pada posisi yang lemah dalam proses negosiasi. Kondisi tersebut kerap muncul karena petani sering mengalami kerugian akibat keterpaksaan dalam memperoleh sarana produksi maupun sumber daya perkebunan dengan biaya yang tidak sebanding dengan pendapatan dari hasil penjualan produk perkebunan. Dalam situasi yang kurang menguntungkan tersebut, nilai tambah dari proses produksi cenderung lebih banyak dinikmati oleh pihak lain, seperti investor dan pelaku usaha, dibandingkan oleh petani itu sendiri. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan kelompok tani menjadi upaya penting untuk mengurangi berbagai

hambatan yang dihadapi petani dalam mengakses sumber daya perkebunan, termasuk permodalan, teknologi, pembiayaan, keterampilan, serta informasi.

Menurut Holle (2022), penguatan kelompok tani perlu difokuskan pada pembentukan kelembagaan yang mandiri, kuat, dan memiliki daya guna dalam memenuhi kebutuhan para anggotanya. Dalam konteks ini, kelompok tani tidak hanya difungsikan sebagai wahana pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana yang mampu meningkatkan posisi tawar petani melalui penguatan kemampuan negosiasi serta perluasan akses dalam proses pengambilan keputusan terkait pemenuhan sumber daya perkebunan.

Penguatan kelembagaan petani merupakan upaya yang penting dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani yang mana mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016. Penguatan tersebut, petani didorong untuk menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan yang dibentuk dari, oleh, dan untuk petani, sehingga mampu memperkuat serta memperjuangkan kepentingan mereka. Pengembangan kelembagaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan keselarasan antara budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal yang hidup di kalangan petani. Penguatan kelompok tani menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri berlandaskan melalui:

1. Memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama.
2. Melaksanakan pertemuan secara berkala dan berkesinambungan (rapat anggota, rapat pengurus, dan rapat lainnya).
3. Menyusun rencana kerja dalam bentuk Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) berdasarkan kesepakatan dan dilakukan evaluasi secara partisipatif.
4. Memiliki pengadministrasian Kelembagaan Petani.
5. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu sampai dengan hilir.
6. Memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar.
7. Sebagai sumber pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha Petani umumnya dan anggota khususnya.
8. Menumbuhkan jejaring kerja sama kemitraan antara Kelompok tani dengan pihak lain.

9. Mengembangkan pemupukan modal usaha, baik iuran anggota maupun penyisihan hasil kegiatan usaha bersama.
10. Meningkatkan kelas kemampuan Kelompok tani yang terdiri atas Kelas Pemula, Kelas Lanjut, Kelas Madya, dan Kelas Utama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.6. Tanaman Kakao

Tanaman kakao (*Theobroma cacao* L.) merupakan komoditas perkebunan yang tumbuh di wilayah tropis dan tersebar luas di Indonesia. Kakao termasuk salah satu komoditas dalam negeri unggulan dan penyumbang devisa terbesar ketiga di sektor perkebunan setelah karet dan kelapa sawit, sehingga memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Biji kakao digunakan sebagai bahan baku untuk berbagai produk di industri makanan, minuman, farmasi, dan kosmetik, seperti produk kembang gula, bubuk kakao, dan lemak kakao. Meningkatnya permintaan akibat perkembangan industri pengolahan biji kakao perlu diimbangi dengan peningkatan produksi dan produktivitas agar kebutuhan pasar dapat terpenuhi sesuai dengan yang dikemukakan oleh Siregar dan Nurbaiti *dalam* Irsyam *et al.* (2025).

Kakao merupakan tanaman tahunan yang mulai berbuah pada umur sekitar empat tahun. Tanaman ini memiliki masa produksi yang relatif panjang dan dapat bertahan lebih dari 25 tahun apabila dipelihara dengan baik serta dikelola secara optimal. Secara botani, tanaman kakao memiliki klasifikasi tertentu yang dijelaskan menurut Siregar *dalam* Amalia *et al.* (2024) sebagai berikut:

Kingdom : *Plantae*
Divisio : *Spermatophyta*
Class : *Dicotyledoneae*
Ordo : *Malvales*
Family : *Sterculiaceae*
Genus : *Theobroma*
Spesies : *Theobroma cacao* L.

Tanaman kakao dapat tumbuh pada wilayah antara 20° LU hingga 20° LS, namun areal budidaya umumnya berada pada kisaran 7° LU sampai 18° LS dengan ketinggian hingga 800 meter di atas permukaan laut. Hasil penelitian Bisma Wahyu

Farhanandi dan Novita K. Indah (2022) *dalam* Amalia *et al.* (2024) menunjukkan bahwa perbedaan ketinggian tempat memengaruhi variasi karakter morfologi, terutama pada daun, bunga, buah, dan biji. Dari sisi anatomi, perbedaan terlihat pada kerapatan dan indeks stomata daun. Tanaman kakao yang tumbuh di bawah naungan cenderung memiliki indeks stomata lebih tinggi serta menghasilkan biji yang lebih banyak dan berkualitas.

Tanaman kakao memerlukan curah hujan sekitar 500 mm per tahun pada tanah bertekstur lempung atau sekitar 2.000 mm per tahun pada tanah ringan berpasir, dengan distribusi yang merata sepanjang tahun dan periode bulan kering tidak lebih dari 3-4 bulan. Suhu minimum yang sesuai adalah 15°C, suhu maksimum 30°C, dengan suhu optimum sekitar 25,5°C serta fluktuasi yang relatif stabil. Kelembapan udara ideal berada di atas 80%. Intensitas penyinaran optimum sekitar 50%, dan pada lahan yang subur dapat mencapai 50–80%. Kecepatan angin yang sesuai berkisar antara 2–5 m/detik, sedangkan kecepatan di atas 10 m/detik berpotensi merusak tanaman.

2.1.7. Pemetaan Potensi Lokal

Kemampuan atau sumber daya yang dimiliki suatu desa pada dasarnya merupakan potensi yang dapat dikembangkan. Namun, potensi tersebut akan tetap bersifat potensi apabila tidak diolah dan didayagunakan secara optimal sehingga tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, potensi wilayah memerlukan upaya perencanaan dan pengelolaan yang tepat agar dapat diwujudkan menjadi kekuatan pembangunan yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat desa (Endah, 2020).

Menurut Nurhayati *dalam* Endah (2020) potensi merupakan kemampuan yang memiliki peluang untuk dikembangkan, berupa kekuatan, kesanggupan, maupun daya yang dapat ditingkatkan menjadi lebih besar. Istilah potensi tidak hanya merujuk pada kapasitas yang dimiliki individu, tetapi juga dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan suatu entitas lain, seperti potensi daerah, potensi wisata, dan berbagai sumber daya wilayah lainnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Soetomo *dalam* Endah (2020), mengidentifikasi potensi lokal setidaknya diperlukan tiga aspek utama, yaitu:

1. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang dan berubah seiring dengan dinamika sosial yang terjadi. Kemampuan dalam mengidentifikasi kebutuhan tersebut merupakan wujud dari kapasitas masyarakat untuk membandingkan kondisi aktual yang dihadapi dengan kondisi ideal yang menjadi cita-cita bersama.
2. Identifikasi potensi, sumber daya, dan peluang yang terus berkembang merupakan langkah penting dalam pemberdayaan masyarakat. Tanpa proses tersebut, potensi dan sumber daya yang ada akan tetap bersifat laten dan tidak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, identifikasi perlu dilakukan sebagai bagian dari prinsip pengutamaan potensi dan sumber daya lokal dalam pembangunan masyarakat.
3. Pengembangan merupakan proses dan upaya untuk menemukan cara yang lebih efektif dan menguntungkan dalam memanfaatkan potensi serta sumber daya yang tersedia. Melalui proses belajar sosial dan adaptasi terhadap lingkungan, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan dan strategi dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.

Menurut (Mulyani *et al.*, 2024) bahwa potensi kapasitas lokal dalam pemberdayaan kelembagaan petani dapat diketahui melalui proses identifikasi kapasitas lokal yang dianalisis berdasarkan beberapa dimensi:

1. Kapasitas Pengetahuan Lokal

Dimensi kapasitas pengetahuan lokal merujuk pada pengetahuan yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan sosial masyarakat. Kapasitas pengetahuan lokal berdasarkan empat aspek yaitu:

- a. Aspek pendidikan, mencakup komposisi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh petani.
- b. Aspek kesehatan, mencakup jenis penyakit yang sering diderita masyarakat, seperti sakit kepala, demam, flu, batuk, diare, dan gatal-gatal.
- c. Aspek infrastruktur dan fasilitas umum, suatu prasarana umum fundamental yang disediakan untuk memudahkan segala kegiatan masyarakat dan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik.

2. Aktor atau Pelaku

Dimensi aktor atau pelaku merujuk pada individu yang berperan strategis karena memiliki pengetahuan dan kapasitas dalam memahami serta mengelola persoalan sosial budaya dan dinamika masyarakat setempat.

- a. Pemimpin informal, pemimpin nonformal adalah pemimpin yang tidak diangkat secara resmi berdasarkan surat keputusan tertentu. Dia memperoleh kekuasaan atau wewenang karena pengaruhnya terhadap kelompok.
- b. Tokoh Adat, tokoh adat merupakan pemimpin masyarakat, baik dalam struktur formal maupun nonformal, yang memiliki peran dalam menjaga nilai, norma, dan tradisi yang berlaku di lingkungan setempat.
- c. Tokoh agama, tokoh agama adalah individu yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam di bidang keagamaan, berakhlak baik, serta memiliki kompetensi dalam praktik dan wawasan keagamaan sehingga menjadi panutan bagi masyarakat di sekitarnya.
- d. Organisasi masyarakat, organisasi yang dimaksud adalah lembaga yang didirikan dan dibentuk secara sukarela oleh masyarakat berdasarkan kesamaan aspirasi, kebutuhan, kepentingan, serta tujuan bersama untuk meningkatkan kondisi sosial, kesejahteraan, pendidikan, dan fungsi komunitas secara menyeluruh.

3. Sistem Sosial

- a. Sistem Kekerabatan, adalah sistem turun temurun yang dianut oleh kelompok etnis tertentu berdasarkan garis keturunan ayah, ibu atau keduanya.
- b. Pertemanan, yaitu hubungan “akrab” antara seseorang dengan orang lainnya. Teman merupakan salah satu yang berpengaruh besar terhadap perilaku dan corak kehidupan seseorang.
- c. Kelembagaan lokal, merupakan sebuah organisasi yang terbentuk dalam lokalitas tertentu untuk melayani kebutuhan anggotanya.

2.1.8. Analisis *Stakeholders*

Analisis pemetaan *stakeholder* merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi serta menilai tingkat kepentingan berbagai pihak utama, baik individu, kelompok, maupun institusi yang berpotensi memengaruhi keberhasilan suatu program atau kegiatan (Fonna *et al.*, 2026). Pemetaan

stakeholder juga dipahami sebagai alat strategis yang dimanfaatkan untuk mengkaji kondisi lingkungan suatu kegiatan sekaligus menentukan strategi yang paling sesuai dalam proses komunikasi, negosiasi, dan pembahasan terkait implementasinya (Noor, 2022) dalam Fonna et al. (2026).

Model ini memberikan kerangka bagi organisasi untuk menentukan pihak-pihak yang harus dilibatkan secara intensif, pihak yang cukup memperoleh informasi, serta pihak yang hanya perlu diawasi, sehingga pengelolaan relasi antar aktor dapat berlangsung secara lebih terarah dan efisien. Eden dan Ackermann (1998) dalam Fonna et al. (2026), mengemukakan bahwa pemetaan *stakeholder* tidak sekadar berfungsi sebagai alat pengelompokan, melainkan juga sebagai bagian dari proses dialog strategis di antara para aktor yang terlibat. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap pola interaksi, kepentingan, serta tingkat pengaruh masing-masing *stakeholder* dalam merumuskan strategi yang terintegrasi, mendorong peningkatan partisipasi, dan memperkuat sinergi untuk mencapai tujuan organisasi maupun program, termasuk dalam pengembangan desa wisata.

Menurut Maryono dalam Ariyanto & Marom (2019) terdapat tiga jenis *stakeholder* yaitu:

1. *Stakeholder* primer yaitu *stakeholder* yang menerima dampak langsung dari suatu rencana atau kegiatan tertentu, dampak tersebut dapat berupa dampak yang bersifat positif dan negatif, *stakeholder* ini biasanya banyak terlibat di dalam proses awal hingga akhir sebuah kegiatan.
2. *Stakeholder* kunci yaitu *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan pengaruh yang besar terhadap proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi atau kegiatan karenanya merekalah yang biasanya bertanggung jawab atas kegiatan secara penuh.
3. *Stakeholder* sekunder, yaitu *stakeholder* pendukung biasanya mereka tidak terlibat secara langsung di dalam sebuah organisasi atau kegiatan tertentu karena mereka tidak memiliki kepentingan dan pengaruh secara langsung dalam program tetapi mereka memiliki peran dalam mendukung dan memberi saran / masukan terhadap sebuah program.

Berkaitan selanjutnya dengan klasifikasi apabila dianalisis menurut tingkat kepentingan dan pengaruh seorang tokoh bernama Gardener *et al.* dalam Ariyanto & Marom (2019) mengklasifikasikan beberapa *stakeholder* sebagai berikut:

1. Subyek (*Subject*) merupakan *stakeholder* yang memiliki kepentingan yang tinggi akan tetapi memiliki pengaruh yang rendah.
2. Pemain kunci (*Key player*) adalah *stakeholder* yang memiliki kepentingan tinggi serta memiliki pengaruh yang tinggi pula.
3. Pengikut (*Crowd*) adalah *stakeholder* yang memiliki pengaruh yang rendah serta kepentingan yang rendah juga.
4. Pendukung (*Contest setter*) adalah *stakeholder* yang memiliki kepentingan yang rendah akan tetapi memiliki pengaruh yang tinggi.

2.1.9. Analisis SWOT

Analisis SWOT atau *strength, weaknesses, opportunities, threats* merupakan suatu pendekatan analisis strategis yang dirancang secara sistematis dan dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan strategi organisasi atau bisnis. Melalui penerapan analisis ini, organisasi berupaya mengoptimalkan kekuatan serta peluang yang berasal dari kondisi internal. Secara bersamaan, analisis SWOT juga menekankan pentingnya pengelolaan kelemahan internal dan upaya mengantisipasi berbagai ancaman yang bersumber dari lingkungan eksternal organisasi (Jannah *et al.*, 2024)

Salah satu metode yang dapat dimanfaatkan dalam penentuan strategi dasar organisasi adalah analisis SWOT. Rangkuti (2006) dalam Sunarsi (2024) analisis SWOT merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis sebagai landasan dalam perumusan strategi organisasi. Pendekatan ini menekankan pada pemanfaatan kekuatan dan peluang yang dimiliki organisasi secara optimal. Di sisi lain, analisis SWOT juga diarahkan untuk meminimalkan kelemahan serta mengantisipasi berbagai ancaman yang berpotensi dihadapi.

Kekuatan (*strengths*) mengacu pada kapasitas dan sumber daya yang dimiliki organisasi dan dikelola secara efektif sehingga mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi (Zebua, 2024). Peluang (*opportunities*) merupakan kondisi positif yang berasal dari lingkungan eksternal dan berpotensi memberikan

manfaat, khususnya bagi organisasi yang bergerak pada bidang atau industri yang sejenis. Kelemahan (*weaknesses*) berkaitan dengan keterbatasan, ketidakefisienan dalam pelaksanaan aktivitas organisasi, serta minimnya sumber daya yang dimiliki. Sementara itu, ancaman (*threats*) merujuk pada faktor eksternal yang bersifat merugikan dan dapat menghambat kinerja organisasi, sehingga meningkatkan kerentanan dalam menghadapi kondisi tertentu.

Analisis SWOT telah digunakan sejak zaman dahulu sebagai alat untuk merumuskan strategi dalam memenangkan pertempuran. Seiring perkembangan waktu, penggunaan analisis SWOT tidak lagi terbatas pada bidang militer. Saat ini, analisis SWOT banyak diterapkan dalam berbagai bidang, khususnya dalam perencanaan strategi bisnis. Pendekatan ini digunakan untuk membantu organisasi dalam menentukan arah kebijakan dan pengambilan keputusan secara strategis.

Analisis SWOT menekankan pada kajian terhadap faktor internal dan eksternal organisasi yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai dasar dalam perumusan strategi serta penyusunan rencana kegiatan (Agastya & Ariyani, 2023). Penerapan pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara sistematis berbagai unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi keberlanjutan serta kinerja organisasi atau perusahaan (Sasoko & Mahrudi, 2023).

1. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan merupakan faktor internal yang menjadi keunggulan suatu perusahaan atau lembaga dalam menghadapi persaingan. Suatu organisasi dinilai memiliki kekuatan apabila didukung oleh sejumlah indikator utama, seperti sistem pemasaran yang efektif, kondisi keuangan yang stabil, kapasitas produksi yang memadai, peluang pertumbuhan yang prospektif, serta kualitas dan efisiensi sumber daya manusia yang baik.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Kelemahan merupakan faktor internal yang ditunjukkan oleh keterbatasan kompetensi atau kemampuan tertentu sehingga berpotensi menghambat kinerja organisasi. Pengenalan terhadap kelemahan memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan identifikasi kekuatan, mengingat daya saing perusahaan atau lembaga tidak dapat dibangun dari aspek yang lemah, melainkan dari keunggulan yang dimiliki. Oleh karena itu, kelemahan perlu diidentifikasi sejak dini agar dapat

dilakukan upaya perbaikan, sehingga kelemahan tersebut dapat diminimalkan atau bahkan dikembangkan menjadi potensi kekuatan.

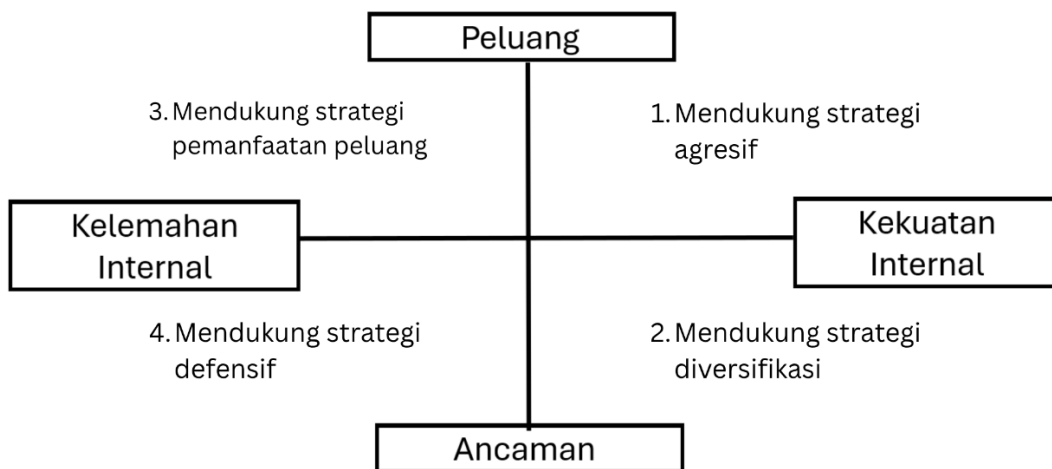
3. Peluang (*Opportunities*)

Peluang merupakan kondisi yang berasal dari lingkungan eksternal dan bersifat menguntungkan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh perusahaan atau lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seperti halnya kekuatan, peluang termasuk faktor positif yang dapat dioptimalkan dalam perumusan strategi pengembangan organisasi. Peluang umumnya muncul dari dinamika lingkungan eksternal yang membuka kesempatan bagi perusahaan atau lembaga untuk mengerahkan serta memanfaatkan kekuatan yang dimiliki guna memperoleh hasil yang lebih optimal.

4. Ancaman (*Threat*)

Ancaman merupakan faktor yang berasal dari lingkungan eksternal dan bersifat merugikan, sehingga berpotensi menghambat keberlangsungan aktivitas perusahaan atau lembaga. Keberadaan faktor ini perlu diantisipasi karena dapat menimbulkan berbagai risiko yang berdampak pada penurunan kinerja, bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. Apabila tidak dikelola secara tepat, ancaman dapat menurunkan tingkat efektivitas dan efisiensi operasional organisasi (Cipta & Hatamar, 2020).

Analisis SWOT dibagi ke dalam empat kuadran utama yang masing-masing menghasilkan alternatif strategi berbeda (Rangkuti, 2018), sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Analisis SWOT

- a. Kuadran 1 : Ini merupakan kondisi yang menguntungkan karena organisasi memiliki kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk merebut peluang yang tersedia. Pada posisi ini, strategi yang tepat adalah strategi pertumbuhan agresif (*growth oriented strategy*).
- b. Kuadran 2 : Menunjukkan kondisi di mana organisasi menghadapi berbagai ancaman, namun tetap memiliki kekuatan internal yang dapat diandalkan. Strategi yang disarankan adalah memanfaatkan kekuatan tersebut untuk menghadapi ancaman sekaligus mengoptimalkan peluang jangka panjang melalui strategi diversifikasi, baik diversifikasi produk maupun pasar.
- c. Kuadran 3 : Menunjukkan kondisi ketika organisasi memiliki peluang pasar yang besar, namun masih dibatasi oleh kelemahan internal. Posisi ini serupa dengan kategori *question mark*, yang memerlukan perhatian dan pengembangan lebih lanjut. Strategi yang tepat adalah meminimalkan kelemahan internal agar peluang yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Sebagai contoh, perusahaan dapat melakukan inovasi atau pengembangan produk untuk meningkatkan daya saing di pasar.
- d. Kuadran 4 : Menggambarkan kondisi yang kurang menguntungkan karena organisasi menghadapi berbagai ancaman eksternal sekaligus kelemahan internal. Pada posisi ini, strategi yang umumnya diterapkan bersifat defensif untuk meminimalkan risiko dan mengurangi dampak kerugian.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
1	Strategi Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani dalam Usaha Tani <i>Agroforestry</i> : Kasus Kelompok Tani Kecamatan Sodonghilir, Tasikmalaya (2021) Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan	Untuk menganalisis faktor strategis, mengkaji berbagai alternatif strategi, dan menyusun rekomendasi prioritas strategi penguatan kelompok tani dalam pengembangan usaha tani <i>agroforestry</i>	Menggunakan analisis Kualitatif (SWOT).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih lemahnya kelembagaan kelompok tani berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan usaha tani <i>agroforestry</i> di Kecamatan Sodonghilir. Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa faktor internal dan eksternal merupakan dua faktor strategis yang dijadikan sebagai dasar perumusan dua strategi prioritas dari enam alternatif strategi penguatan kelembagaan kelompok tani dalam usaha tani <i>agroforestry</i> . Kedua strategi prioritas tersebut terdiri dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peran kelompok tani dalam pengembangan usahatani <i>agroforestry</i> .

Lanjutan Tabel 1.

2	Strategi Penguatan Modal Sosial pada Kelompok Wanita Tani Mekar dalam Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan di Kelurahan Margomulyo Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman (2023) Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)	Mengidentifikasi implementasi modal sosial KWT Mekar dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan dan mengidentifikasi strategi penguatan modal sosial KWT Mekar dalam kegiatan pemanfaatan pekarangan di Kelurahan Margomulyo Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman	Menggunakan analisis Deskriptif kualitatif (SWOT)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KWT Mekar telah menerapkan unsur modal sosial dengan baik, ditandai dengan diterapkan keempat unsurnya, yaitu kepercayaan, norma, jaringan sosial, dan hubungan timbal balik dalam melakukan kegiatan pemanfaatan pekarangan yaitu budidaya tanaman.
3	Penguatan Kelembagaan untuk Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing pada Kelompok Wanita Tani Sekar Wangi Desa Krajan (2025) <i>Indonesian Journal of Community Service and Innovation</i> (IJCOSIN)	Untuk memperkuat kelembagaan Kelompok Wanita Tani (KWT) Sekar Wangi di Desa Krajan sebagai upaya meningkatkan kemandirian dan daya saing kelompok dalam pengelolaan usaha tani jamur dan produk olahan jamur	Pendekatan partisipatif (<i>Participatory Rural Appraisal</i>)	Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan anggota dalam mengelola organisasi, meningkatnya partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta terbentuknya jejaring pemasaran yang lebih luas.

Lanjutan Tabel 1.

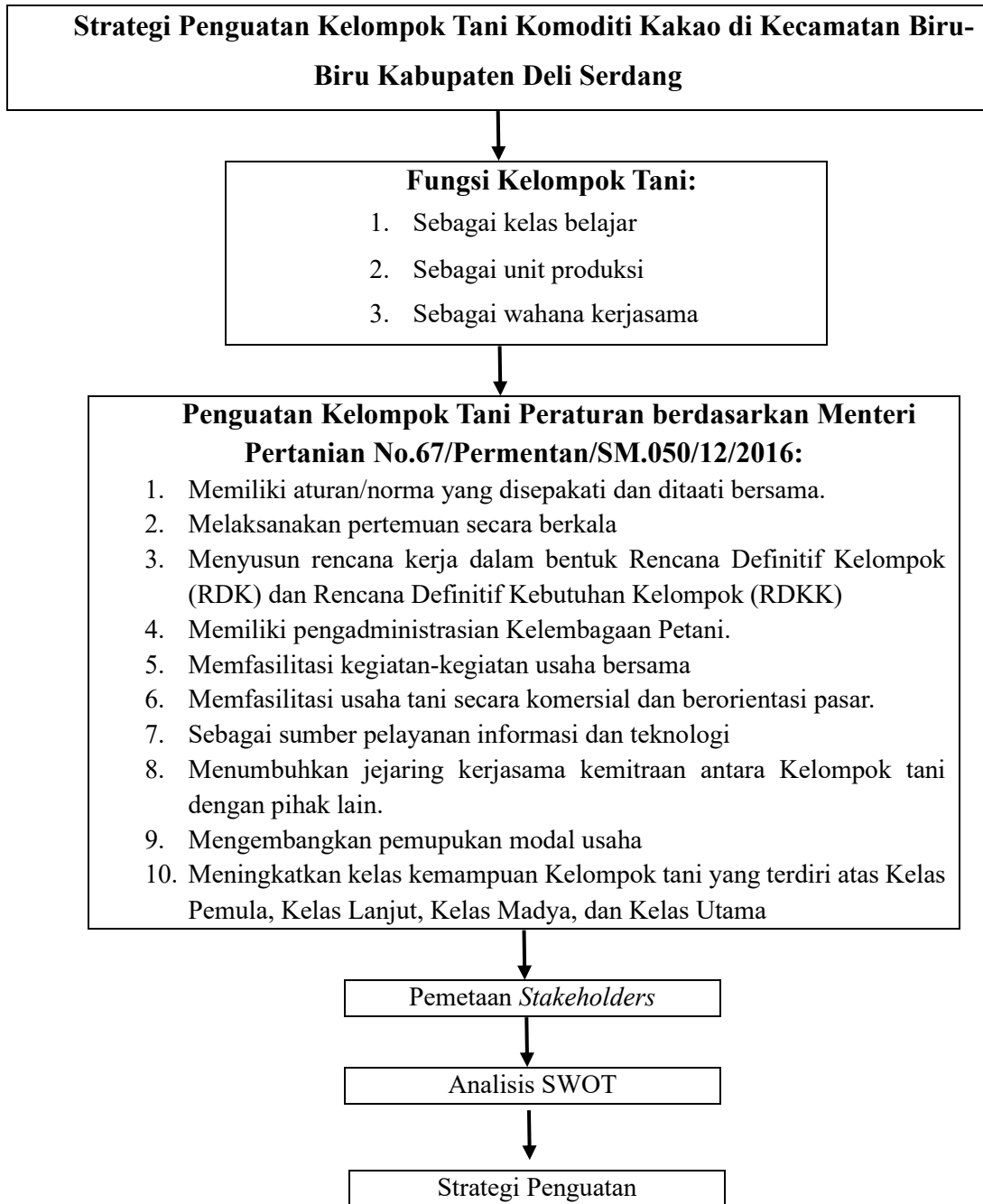
4	Strategi Penguatan Kelompok Tani “Senior Ganepo” di Jorong Padang Kandi Nagari Tujuh Koto Talago, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat (2021) <i>Journal of Socio Economics on Tropical Agriculture</i> (JOSETA)	1) Mendeskripsikan pelaksanaan usaha pengolahan rubik ganepo pada Kelompok Tani Senior Ganepo, 2) Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal terhadap perubahan kondisi pada Kelompok Tani Senior Ganepo 3) Merumuskan strategi penguatan Kelompok Tani Senior Ganepo.	Metode deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif	Hasil penelitian didapatkan 6 alternatif strategi, yaitu: a) Meningkatkan sumber daya anggota untuk menjadikan rubik ganepo sebagai produk unggulan daerah, b) Pengembangan produk ke daerah geografis yang baru, c) Meningkatkan produktivitas anggota dalam mewujudkan rubik ganepo sebagai <i>local brand</i> , d) Meningkatkan sumber daya dibidang teknologi dalam menentukan ketahanan produk, e) Melakukan diversifikasi produk secara objektif, f) Menerapkan manajemen risiko dalam segala aspek di dalam kelompok
---	--	--	---	---

Lanjutan Tabel 1.

5	Kinerja dan Strategi Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani dalam Program Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Cilacap (2025) Jurnal Impresi Indonesia (JII)	Untuk mengetahui penerapan program pupuk bersubsidi, kinerja kelembagaan kelompok tani dan strategi penguatan kelembagaan kelompok tani dalam program pupuk bersubsidi di Kabupaten Cilacap	Kualitatif (metode kuantitatif dan kualitatif).	Program Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Cilacap berdasarkan jumlah petani bertransaksi dalam kategori baik yaitu 68,06 %, Kinerja kelembagaan kelompok tani dalam penerapan program pupuk bersubsidi termasuk dalam kategori baik dengan capaian 53,52%. Faktor internal dan eksternal penerapan program pupuk bersubsidi berada pada kuadran I merupakan situasi yang sangat menguntungkan bagi kelompok tani yaitu kelompok memiliki kekuatan untuk memanfaatkan peluang dalam penguatan kelembagaan mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (<i>growth oriented strategy</i>)
---	--	---	---	---

2.3 Kerangka Pikir

Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan literatur, penyusunan kerangka pemikiran dalam kajian ini bertujuan untuk membangun dasar pemikiran yang memudahkan dalam memberikan arahan akhir mengenai penguatan fungsi kelompok tani dalam mendukung agribisnis komoditi kakao di Kecamatan Biru-Biru.



Gambar 2. Kerangka Pikir

2.4 Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian analisis *stakeholder* dalam penyusunan strategi penguatan kelompok tani untuk mendukung agribisnis komoditi kakao. Penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada identifikasi faktor internal dan eksternal kelompok tani sebagai dasar perumusan strategi. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis pelaksanaan fungsi kelompok tani sebagai kelas belajar, wahana kerja sama, dan unit produksi, tetapi juga mengidentifikasi peran, kepentingan, serta pengaruh masing-masing *stakeholder* dalam penguatan kelompok tani. Dengan demikian, strategi yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal kelompok, tetapi juga memperhatikan keterlibatan para *stakeholder* yang memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan implementasi strategi penguatan kelompok tani.